

**Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam
(Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)**

Indrawati^{*1}, Su'aidi², Minnah El Widdah², Romanda Aldila², Fathul Anwar³

¹Institut Islam Ma'arif Jambi, Indonesia

²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

³IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: Indrawati.aidan@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan pendidikan Islam pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di Institut Islam Ma'arif Jambi. Proses kebijakan pendidikan merupakan suatu rangkaian tindakan strategis yang dirancang untuk mewujudkan sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, kebutuhan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kebijakan pendidikan Islam di Prodi IAT dilakukan melalui lima tahapan analisis kebijakan: inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan mengacu pada standar operasional prosedur dan dokumen regulatif internal seperti statuta, pedoman pengelolaan, serta peraturan yayasan. Penjaminan mutu kebijakan dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), dengan melibatkan aktif Unit Penjaminan Mutu dan LPM. Meskipun secara umum tata pamong dan tata kelola telah berjalan secara kredibel, transparan, dan akuntabel, masih terdapat tantangan seperti belum terintegrasinya sistem informasi dan arsip data, serta optimalisasi komunikasi kerja sama nasional. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi lintas unit, digitalisasi sistem informasi, serta penguatan kerja sama eksternal sebagai strategi pengembangan kebijakan ke depan.

Kata Kunci: Kebijakan; Pendidikan; Islam

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional Indonesia telah menetapkan bahwa segala bentuk proses pendidikan yang ada dinegara Indonesia harus dilaksanakan dan dikembang secara maksimal agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan undang-undang tersebut tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan setiap warga negara memiliki wawasan keilmuan yang luas serta

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam (Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

memiliki kepribadian yang luhur berlandaskan pancasila. Artinya bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia menjadikan setiap warga negara menguasai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilandasi oleh aspek sikap yang baik. Maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan pengelolaan dan pengawasan mutu yang maksimal.

Berkat semangat juang para tokoh-tokoh keislama dahulu maka lahirlah Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang undang no 20 tahun 2003 yang berisi Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹.

Kebijakan merupakan modal yang utama dimiliki oleh unsur pemerintah dalam mengabil Kebijakan untuk mengatur dari sebuah organisasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya lembaga pendidikan islam. Ketika melihat historis suatu kebijakan ini adalah ilmu yang baru karena baru muncul pada tahun 1960-an sebagai suatu disiplin yang tampak nyata dalam lingkup administrasi baik publik maupun ilmu politik. Sementara itu, analisis kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis dan dapat dirunut sejak adanya peradaban umat manusia. Sejak itu, kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara².

Pendidikan islam merupakan substansi dari pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan islam bertujuan mengembalikan potensi peserta didik berdasarkan nilai-nilai islam dan membentuk manusia yang berkpribadian³.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan islam adalah:

1. Faktor agama
2. Faktor ideologi Negara
3. Faktor perkembangan Masyarakat

¹ “UU. RI No. 23 tahun 2003. *Tentang sistem pembangunan Nasional*” (Citra Umbara, 2010), 23.

² Abd Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 27.

³ Abdul Syukur Abu Bakar, “Sistem Pendidikan Islam,” *JPK: Jurnal Pendidikan Kreatif* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24252/jpk.v1i1.14989>.

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam (Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

4. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan.⁴

Dalam mustakin mengungkapkan Untuk mampu meberikan pelayana yang terbaik maka pihak penyelenggara mesti dapat memahami berbagai pendapat, karakteristik masyarakat serta kebutuhan masyarakat⁵. Pendidikan diharapkan mampu memberikan pelayanan secara nyata kepada masyarakat dari tingkat pusat hingga pada masyarakat terendah di daerah⁶. Maknanya dibutuhkan usaha dalam menjalin komunikasi dengan pihak terkait dalam pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan dapat merumuskan dan mengambil keputusan yang berhubungab dengan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan hubungan pendidikan serta pengoptimalusasi proses pengelolaan suatu lembaga pendidikan.

Agar menghasilkan keputusan kebijakan pendidikan yang sesuai tepat sasaran oleh karena itu pihak penyelenggara mesti dapat mengetahui arti yang sebenarnya kebijakan pendidikan serta proses yang benar baik yang berhubungan langsung dengan kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan. Maka dari itu tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses kebijakan pendidikan islam yang diambil dari lembaga pendidikan islam yakni Institut Islam Ma'arif Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses kebijakan pendidikan Islam yang berlangsung pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di Institut Islam Ma'arif Jambi. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada proses, makna, dan dinamika kebijakan pendidikan yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan melalui

⁴ Marzuenda dan uslam, *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Reformasi*, Kereatifitas Jurnal pendidikan Islam, Vol. 11 nomor 1, 2022 hal. Marzuenda dan Usman, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Reformasi," *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): 65–71, <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v11i1.535>.

⁵ Mustaqim, "Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 1 (2016): 245–75.

⁶ Sukarman Purba dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Kita Menulis, 2021).

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam (Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

pemahaman kontekstual dan interpretatif terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci seperti ketua program studi, dosen, pengelola akademik, dan staf Unit Penjaminan Mutu yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
2. Observasi partisipatif, untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan, mekanisme koordinasi, serta pola pengambilan keputusan di tingkat program studi.
3. Dokumentasi, dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan, seperti statuta institusi, standar operasional prosedur (SOP), pedoman akademik, SK Ketua, serta dokumen SPMI dan laporan Audit Mutu Internal (AMI).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Peneliti melakukan koding terhadap data hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tahapan proses kebijakan (inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, dan evaluasi). Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik, serta pengecekan silang antar-informan dan dokumen. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana proses kebijakan pendidikan Islam di lingkungan Prodi IAT dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi dan nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Teoritis

1. Proses Kebijakan Pendidikan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan dibidang pendidikan yang diambil dengan memperhatikan komponen-komponen pendidikan dan komponen sosial yang berkaitan⁷. Kebijakan pendidikan yang dilahirkan harus bersifat

⁷ Mujianto Solichin, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi," *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 148–78,

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam (Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

intredisipliner dan kontekstual⁸. Untuk dapat melahirkan kebijakan pendidikan maka diperlukan analisis kebijakan pendidikan yang tepat. Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan melalui pendekatan ilmu sosial terapan dengan menggunakan metode inquiri dan argumen ganda.

Pembuatan kebijakan tidak terlepas dari hal yang bersifat politis dikarenakan dalam pembuatan kebijakan akan terjadi proses pertentangan antar kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.⁹ Maka dalam pengembangan kebijakan pendidikan tersebut harus mampu mengalahkan ego pribadi dan kelompok sehingga pertentangan yang terjadi bersifat netral dan objektif. Oleh sebab itu para pembuat kebijakan pendidikan harus mampu memahami kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan, proses analisis kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan agar terciptanya kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Analisis kebijakan merupakan proses pengimplementasian ilmu sosial dengan menggunakan bentuk pemikiran, penalaran, pembuktian, penilaian dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan masyarakat luas¹⁰. Agar dapat menghasilkan pandangan yang rasional diperlukan sebuah prosedur analisis. Adapun prosedur tersebut adalah mengenai informasi kebijakan. Pada proses informasi kebijakan terdapat 3 jenis informasi yang harus dilahirkan yaitu 1) Informasi mengenai nilai. Informasi mengenai nilai berhubungan dengan bagaimanakah proses nilai yang terdapat pada kebijakan tersebut; 2) Fakta. Informasi tentang fakta berhubungan dengan apakah hal yang dibicarakan tersebut ada atau tidak ada; 3) Perbuatan. Informasi tentang perbuatan berhubungan dengan apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

<https://web.archive.org/web/20191227065020/http://journal.unipdu.ac.id:80/index.php/religi/article/download/486/433>.

⁸ Muhammad Nur Asmawi, "Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Globalisasi, Pasar Bebas dan Revolusi Industri 4.0," *Scolae: Journal of Pedagogy* 1, no. 2 (2018): 1–10, <https://www.neliti.com/publications/322098/kebijakan-pendidikan-islam-pada-era-globalisasi-pasar-bebas-dan-revolusi-industr>.

⁹ Ahmad Zain Sarnotono, "Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia," *Educhild: Pendidikan dan Sosial* 1, no. 1 (2023): 30–40, <https://www.neliti.com/publications/22931/konsepsi-politik-pendidikan-di-indonesia>.

¹⁰ Andi Samsu Alam, "Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif," *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2009): 78–92, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1133>.

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam (Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

Masing-masing informasi akan menghasilkan luaran yang berbeda. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai akan mendapatkan informasi yang bersifat evaluatif, untuk pertanyaan yang berkaitan dengan fakta akan mendapatkan informasi yang bersifat deskriptif dan pertanyaan normatif akan mendapatkan informasi yang bersifat pembenaran (pembelaan).

Dalam proses analisis kebijakan terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun proses analisis kebijakan tersebut yaitu¹¹:

1. **Inisiasi** Tahap inisiasi diawali ketika adanya masalah yang bersifat potensial. Permasalahan potensial tersebut dirasakan ketika adanya upaya untuk mengurangi permasalahan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara tepat. Pada fase ini belum dituntut untuk dapat merumuskan permasalahan namun diperlukan sebuah pemikiran lebih lanjut apakah permasalahan ini diperlukan untuk dirumuskan. Pada tahap ini juga dilakukan proses inovasi dalam melakukan konseptualisasi dan membuat kerangka permasalahan secara umum. Selain itu juga diperlukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebijakan secara umum dan memprediksi pilihan-pilihan kebijakan yang dirasa dapat untuk dikembangkan.
2. **Estimasi** Pada tahapan estimasi ini diperlukan pemikiran yang berhubungan dengan dampak, pembiayaan dan kelebihan dari alternatif yang disajikan. Pada tahapan ini masalah difokuskan dengan menggunakan metode olian yang bersifat proyektif dan empirik agar dapat diketahuinya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dipilih. Pengkajian juga difokuskan kepada evaluasi terhadap luaran yang akan dihasilkan melalui pendekatan teknis lainnya.
3. **Seleksi** Tahapan seleksi ini berkaitan dengan keputusan. Setelah dilakukan analisis kebijakan berupa perumusan dan penilaian kebijakan maka diperlukanlah pemilihan kebijakan. Pengambilan keputusan sering kali dilahirkan dengan perhitungan dan perkiraan teknis namun adanya aspek lain yang perlu diperhatikan seperti keterlibatan

¹¹ Philipus Keban, "Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif," *Jejaring Administrasi Publik* 7, no. 2 (2015): 799–803, <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp27ba0e7a40full.pdf>.

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam
(Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

pihak-pihak lain yang memiliki tujuan yang berbeda mengenai pandangan ideologi, moral, dan kerangka acuan.

4. **Implementasi** Tahapan implementasi merupakan tahapan melaksanakan pilihan yang telah disepakati. Tahapan implementasi merupakan sarana untuk melakukan uji kelayakan pilihan yang dipilih secara nyata. Pada tahapan sebelumnya kebijakan masih dalam bentuk pemikiran sedangkan pada tahapan implementasi ini kebijakan dapat dilaksanakan secara nyata.
5. **Evaluasi** Pada tahapan inisiasi dan estimasi, sifat tahapan bersifat antisipatif sedangkan pada tahapan seleksi lebih bersifat kekinian. Pada tahapan implementasi lebih bersifat transformasi ke dalam dunia nyata sedangkan pada tahapan evaluasi lebih bersifat retrospektif. Pada tahapan ini berusaha untuk menemukan jawaban mengenai sejauh mana kebijakan yang dipilih berhasil. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran dengan indikator yang telah dilakukan.

B. Data Empiris

1. Proses Kebijakan Pendidikan Islam Institut Islam Ma'arif Jambi

Mekanisme tata pamong di tingkat Prodi meliputi mekanisme kerja, mekanisme koordinasi antara Institusi dan Prodi, mekanisme pengambilan keputusan, kepemimpinan, mekanisme penentuan kebijakan dan mekanisme monitoring serta evaluasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Institut Islam Ma'arif Jambi mengacu pada Organisasi Tata Kerja sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 dan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Sistem ini pada dasarnya menganut sistem akademik yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam pendistribusian kegiatan akademik.

a) Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola di Institut Islam Ma'arif Jambi Berdasarkan Peraturan yang Tertuang Dalam:

- 1) Peraturan yang tertuang dalam buku I (Pedoman Penyusunan Pengelolaan Kurikulum dan Penilaian Hasil Studi Mahasiswa)
- 2) Buku II (Pedoman Pengelolaan dan Administrasi Pendidikan)
- 3) Buku A (Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja)

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam
(Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

- 4) Buku B (Pedoman Pengelolaan, Pengapkiran dan Penghapusan Pelaporan dan Pengawasan Barang Inventaris) berjalan secara efektif dapat dilakukan melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi.
 - 5) STATUTA Institut Islam Ma'arif Jambi
 - 6) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 9) Standar Sistem Kelembagaan dan Sistem Manajemen
 - 10) Peraturan Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Jambi tentang Pokok-pokok Kepegawaian Institut Islam Ma'arif Jambi
 - 11) Surat Keputusan Ketua tentang persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Ketua di Lingkungan Institut Islam Ma'arif Jambi.
 - 12) Surat Keputusan Ketua tentang Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Wakil Ketua, Ketua Prodi di Lingkungan Institut Islam Ma'arif Jambi.
 - 13) Surat Keputusan Ketua tentang Pembentukan Komisi Senat.
 - 14) Peraturan Ketua tentang kode etik Mahasiswa
- b) Organisasi dan Tata Kerja**
- 1) Peraturan Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Jambi tentang Pokok-pokok Kepegawaian Institut Islam Ma'arif Jambi
 - 2) Keputusan Ketua tentang Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Institut Islam Ma'arif Jambi.
 - 3) Surat Keputusan Ketua tentang susunan, Kedudukan, dan Tata Tertib Senat Institusi.
 - 4) Standar Penataan Kelembagaan dan sistem manajemen
 - 5) Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Institut Islam Ma'arif Jambi.
 - 6) Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Jambi tentang Pedoman Pemberian Tugas atau Izin Belajar bagi Tenaga Pendidikan (Dosen) dan Tenaga Kependidikan.

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam
(Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

- 7) Surat Keputusan Ketua tentang pedoman kenaikan pangkat pegawai dilingkungan Institut Islam Ma'arif Jambi
- 8) Surat Keputusan Ketua tentang tarif dan honorarium di Institut Islam Ma'arif Jambi
- 9) Surat Keputusan Badan Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Jambi tentang kenaikan gaji pokok pegawai Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Jambi di lingkungan Institut Islam Ma'arif Jambi
- 10) Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Jambi Nomor tentang tunjangan jabatan struktural pegawai Institut Islam Ma'arif Jambi
- 11) Keputusan Ketua tentang insentif dosen berpendidikan doktor.
- 12) Peraturan Ketua tentang pedoman penilaian dosen dan tenaga kependidikan berpretasi
- 13) Peraturan Ketua tentang kode etik dosen Institut Islam Ma'arif Jambi
- 14) Peraturan Ketua tentang kode etik tentang kependidikan Institut Islam Ma'arif Jambi.

c) Strategi Pencapaian Standar

Standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar tata kelola Pada Prodi adalah:

Tabel 1. Standar Perguruan Tinggi Dan Strategi Pencapaian Standar Tata Kelola Pada Prodi

No.	Standar	Strategi	Mekanisme Kontrol
1.	Tercapainya sistem tata pamong yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:	1. Membentuk mekanisme job Analisis, <i>Job Specification</i> , dan <i>Job Description</i> .	1. Rutin Melakukan Audit Akademik dan Non Akademik yang dilakukan oleh LPMA. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) secara

**Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam
(Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)**

	<p>kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan Menerapkan prinsip-prinsip keadilan.</p>	<p>2. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran yang dituangkan Dalam surat keputusan Rektor Institut Islam Ma'arif Jambi setiap tahunnya.</p> <p>3. Pemilihan ketua prodi dilakukan secara pemilihan langsung oleh Rektor Institut Islam Ma'arif Jambi</p>	<p>rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas hibah penelitian internal dan penelitian eksternal yang diterima UPPS.</p> <p>3. Institut Islam Ma'arif Jambi secara rutin setiap tahun memaparkan rencana kerja tahunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan sebelumnya ke Ketua Institut Islam Ma'arif Jambi</p> <p>4. Rektor Institut Islam Ma'arif Jambi</p>
--	---	---	--

d) Implementasi

Implementasi penjaminan mutu tata pamong yang berada di UPPS disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Institut Islam Ma'arif Jambi dengan melakukan AMI secara berkala yang berdasarkan kepada SOP yang sudah disusun oleh LPM dan ditetapkan oleh Institut Islam Ma'arif Jambi. Untuk tingkat UPPS, PSMF melakukan monitoring secara komprehensif. Hasil monitoring disampaikan kepada Pimpinan UPPS untuk bersama-sama dievaluasi dan diperbaiki.

Penetapan Tata pamong Tata kelola dan Kerjasama dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya mempelajari visi misi, aturan dan kebijakan pemerintah, hasil

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam (Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

pengukuran, dan masukan dari beberapa unsur pemangku kepentingan. Sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan terkait dengan tata pamong, tata kelola dan kerjasama adalah:

- a. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- b. Standar Pengelolaan Penelitian
- c. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Standar Pengembangan Kompetensi Mahasiswa
- e. Standar Pengembangan Institusi
- f. Standar Penataan Kelembagaan dan Sistem Manajemen
- g. Standar Pengembangan Sistem Informasi
- h. Standar Kerjasama

SPMI Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dan Institut Islam Ma'arif Jambi menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Peningkatan) menghasilkan Kaizen atau *Continuous Improvement* mutu Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dan Institut Islam Ma'arif Jambi.

Sistem pelaksanaan penjaminan mutu yang telah ditetapkan dijalankan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Untuk memastikan pelaksanaan tata pamong, tata kelola dan kerjasama sesuai dengan yang telah ditetapkan maka gugus kendali mutu dan Unit Penjaminan Mutu melakukan evaluasi pelaksanaan mutu yang ada di Institusi.

Untuk mengukur ketercapaian standar yang telah ditetapkan maka penjaminan mutu melakukan Audit Mutu Internal secara tersistem terhadap tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan siklus dan terekam secara komprehensif untuk melihat temuan di lapangan.

Secara berkala akan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan standar untuk tujuan pengembangan dan peningkatan mutu. Dan apabila terdapat item pelaksanaan perkuliahan yang berada diluar standar yang ditetapkan, maka akan segera ditindaklanjuti untuk tujuan pembenahan.

Laporan hasil AMI yang telah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan peningkatan standar. Penetapan peningkatan standar dilakukan atas dasar ketercapaian standar yang telah ditetapkan dan melampaui SN-DIKTI.

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam
(Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

e) Evaluasi

Hasil evaluasi dapat disimpulkan dengan menyatakan bahwa, tata pamong, tata kelola, dan kerjasama di UPPS dan Prodi berjalan dengan sangat baik, namun masih ada beberapa kendala yang menghambat proses tata pamong, tata kelola, dan kerjasama di UPPS dan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Tindak lanjutnya dengan lebih meningkatkan koordinasi dan hubungan yang harmonis antara unit terkait sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal. Sebagaimana hasil analisis swot yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Swot

<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki tata kelola yang lengkap 2. UPPS menerapkan SPMI dan eksternal 3. UPPS dapat memaksimalkan SDM yang dimiliki visi misi Institusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi dan data belum terintegrasi 2. Sistem arsip data yang masih manual 3. Komunikasi kerjasama nasional yang belum optimal
<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threat</i> (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan kampus merdeka 2. Kebijakan zona integritas 3. <i>Trend Good University Governance</i> 4. Terbukanya peluang kerja sama internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan sistem tata kelola UPPS di era digital 2. Kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang tidak menentu

**Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam
(Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)**

KESIMPULAN

Dari data empiris yang didapat menunjukkan bahwa proses kebijakan yang dilakukan pada lembaga pendidikan islam pada prodi IAT Institut Islam Ma'arif jambi dilakukan melalui tahapan inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, dan evaluasi. Yakni berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempedomani pada peraturan sesuai dengan SN Dikti, Kementerian agama dan kebijakan yang di tetapkan pada Institut Islam Ma'arif Jambi.

REFERENSI

- Keban, Philipus. "Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif." *Jejaring Administrasi Publik* 7, no. 2 (2015). <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp27ba0e7a40full.pdf>.
- Madjid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Marzuenda, dan Usman. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Reformasi." *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v11i1.535>.
- Mustaqim. "Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 1 (2016).
- Nur Asmawi, Muhammad. "Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Globalisasi, Pasar Bebas dan Revolusi Industri 4.0." *Scolae: Journal of Pedagogy* 1, no. 2 (2018). <https://www.neliti.com/publications/322098/kebijakan-pendidikan-islam-pada-era-globalisasi-pasar-bebas-dan-revolusi-industr>.
- Purba, Sukarman, Erika Revida, Andi Febriana Tamrin, Erniati Bachtiar Bonaraja Purba, Yulia Rizki Ramadhani, Pratiwi Bernadetta Purba, Dina Chamidah, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Kita Menulis, 2021.
- Samsu Alam, Andi. "Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2009). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1133>.
- Solichin, Mujianto. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015).

Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Islam
(Studi Di Prodi IAT Institut Islam Ma'arif Jambi)

<https://web.archive.org/web/20191227065020/http://journal.unipdu.ac.id:80/index.php/religi/article/download/486/433>.

Syukur Abu Bakar, Abdul. "Sistem Pendidikan Islam." *JPK: Jurnal Pendidikan Kreatif* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/jpk.v1i1.14989>.

"UU. RI No. 23 tahun 2003. Tentang sistem pembangunan Nasional." Citra Umbara, 2010.

Zain Sarnotono, Ahmad. "Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia." *Educhild: Pendidikan dan Sosial* 1, no. 1 (2023). <https://www.neliti.com/publications/22931/konsepsi-politik-pendidikan-di-indonesia>.